

Seminar Nasional  
(PROSPEK IV)

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

## **Kepedulian Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Dalam Masyarakat**

**Naufal Hakim<sup>a</sup>, Hotijah<sup>b</sup>, Putu Siti Firmani<sup>c</sup>**

<sup>a, b, c</sup>Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Jl. Seroja Tonja, Denpasar Utara

\*Pos-el: [hakimnaufal134@gmail.com](mailto:hakimnaufal134@gmail.com), [hotijahsahlan76@gmail.com](mailto:hotijahsahlan76@gmail.com), [putufirmani1971@gmail.com](mailto:putufirmani1971@gmail.com)

**Abstrak.** Peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan ke miskinan di Indonesia melalui perspektif sosiologi ekonomi, yang mengintegrasikan analisis sosial dan ekonomi. Permasalahan pengangguran dan kemiskinan berkaitan erat, di mana peningkatan pengangguran berdampak langsung pada tingginya tingkat kemiskinan. Berbagai faktor penyebab tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia diulas, antara lain rendahnya akses pendidikan, kesehatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterisolasian wilayah. Dampak dari krisis ekonomi 1997, serta penutupan beberapa perusahaan besar, semakin memperparah situasi ini. Pemerintah selama ini telah mencoba menanggulangi masalah ini melalui bantuan langsung tunai dan program jaring pengaman sosial, namun pendekatan tersebut masih kurang efektif karena masyarakat lebih membutuhkan peluang kerja untuk meningkatkan taraf hidup. Artikel ini menyarankan agar pemerintah berperan sebagai fasilitator, memberikan pelatihan keahlian, serta mendorong pembentukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pemerintah diharapkan juga memperluas lapangan pekerjaan melalui kebijakan yang mendukung industri padat karya dan investasi di wilayah yang membutuhkan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.

**Keywords :** *Economic Sociology, Government's Concern, Unemployment and Poverty.*

**Abstract.** The role of the government in overcoming the problem of unemployment and poverty in Indonesia through the perspective of economic sociology, which integrates social and economic analysis. The problem of unemployment and poverty is closely related, where the increase in unemployment has a direct impact on the high poverty rate. Various factors causing the high rate of unemployment and poverty in Indonesia were reviewed, including low access to education, health, limited employment, and regional isolation. The impact of the 1997 economic crisis, as well as the closure of several large companies, further exacerbated this situation. The government has been trying to overcome this problem through direct cash assistance and social safety net programs, but this approach is still ineffective because people need more job opportunities to improve their standard of living. This article suggests that the government play a role as a facilitator, provide skills training, and encourage the formation of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to improve the living standards of the poor. The government is also expected to expand employment opportunities through policies that support labor-intensive industries and investment in areas in need. This approach is expected to increase the economic independence of the community and reduce unemployment and poverty in a sustainable manner.

**Keywords :** *Economic Sociology, Government's Concern, Unemployment and Poverty.*

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

**1. Pendahuluan**

Pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu sosial yang saling berkaitan dan merupakan masalah serius yang terus dihadapi masyarakat Indonesia. Dalam studi sosiologi ekonomi, yang menggabungkan analisis sosial dan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan menjadi sorotan utama karena hubungan sebab-akibat yang erat antara keduanya. Ketika pengangguran meningkat, kemiskinan cenderung mengikuti, menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menangani kedua permasalahan ini menjadi sangat penting untuk menstabilkan kesejahteraan masyarakat dan memperkecil ketimpangan sosial.

Krisis ekonomi tahun 1997 membawa dampak besar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dari kelas ekonomi bawah hingga atas. Dampak tersebut semakin terlihat dengan terjadinya kenaikan harga barang, peningkatan kriminalitas, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Beberapa perusahaan besar bahkan menghentikan operasinya di Indonesia, seperti penutupan Panasonic dan Toshiba pada 2016, yang menambah angka pengangguran dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran bukanlah masalah sederhana yang dapat diatasi dengan bantuan langsung, tetapi memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan serta mengevaluasi pendekatan yang lebih efektif. Beberapa faktor yang memperburuk kondisi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, antara lain terbatasnya akses pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya lapangan kerja, dan keterisolasian wilayah, juga akan dibahas. Selain itu, artikel ini akan menganalisis perlunya pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator yang tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga mendorong pengembangan sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha mikro.

**2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena pengangguran dan kemiskinan dari sudut pandang sosiologi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengkaji peran pemerintah dalam penanggulangan masalah sosial-ekonomi yang terkait erat dengan struktur masyarakat dan kebijakan ekonomi.

**3. Hasil dan Pembahasan**

Dari pembahasan mengenai kepedulian pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, terdapat beberapa hasil utama yang menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, terutama mengingat dampak sosial-ekonomi yang luas. Penyebab Utama Pengangguran dan Kemiskinan: Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia meliputi: Pendidikan: Kurangnya akses dan kualitas pendidikan menimbulkan keterbatasan pada masyarakat dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Pendidikan yang rendah menyebabkan terbatasnya kemampuan individu dalam meningkatkan taraf hidup, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kesehatan: Keterbatasan akses layanan kesehatan memengaruhi kemampuan masyarakat miskin untuk bekerja secara produktif. Kondisi kesehatan yang buruk menurunkan produktivitas kerja dan memperburuk keadaan ekonomi keluarga.

Terbatasnya Lapangan Pekerjaan: Ketersediaan pekerjaan yang rendah tidak mampu menampung jumlah pencari kerja yang terus meningkat. Hal ini diperparah oleh permasalahan pada sektor ekonomi yang lebih mengutamakan industri padat modal daripada padat karya, sehingga masyarakat sulit mendapat kesempatan kerja. Daerah Terisolasi: Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau terisolasi menghadapi tantangan besar untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Minimnya infrastruktur dan distribusi yang sulit menyebabkan biaya hidup

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

meningkat dan hasil produksi pertanian atau perikanan sulit dipasarkan.

Dampak dari Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 menjadi salah satu penyebab peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, yang berdampak langsung pada peningkatan angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Dampaknya pun masih terasa hingga saat ini, dengan masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok serta kesempatan kerja yang terbatas.

Kebijakan Pemerintah yang Kurang Efektif: Beberapa program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah cenderung berfokus pada bantuan langsung, seperti bantuan beras dan program jaring pengaman sosial. Namun, pendekatan ini hanya memberikan solusi jangka pendek dan tidak cukup untuk memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri secara ekonomi. Bantuan langsung hanya mengatasi kebutuhan sesaat tanpa mengatasi akar masalah kemiskinan dan pengangguran.

Pentingnya Pendekatan Berbasis Pemberdayaan: Pemerintah sebaiknya berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dengan memfokuskan pada pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya adalah dengan menyediakan pelatihan keahlian yang dapat membantu masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Program pemberdayaan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi salah satu solusi yang efektif, terutama karena UMKM umumnya dikelola oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Penyediaan Lapangan Kerja dan Mobilitas Tenaga Kerja: Untuk mengatasi masalah pengangguran, pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, khususnya di sektor padat karya yang bisa menampung lebih banyak pekerja.

Mobilitas tenaga kerja juga perlu didorong dengan mempertemukan tenaga kerja dengan pekerjaan yang sesuai melalui program pelatihan ulang, sehingga keterampilan mereka tetap relevan di pasar kerja. Peningkatan mobilitas modal, seperti pemindahan industri padat karya ke wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi, juga bisa membantu dalam mengatasi pengangguran struktural.

Prioritas Kebijakan bagi Masyarakat Miskin: Pemerintah diharapkan mampu merancang kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin yang rentan terdampak pengangguran. Hal ini mencakup regulasi yang mendorong investasi di sektor produktif dan padat karya serta menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Secara keseluruhan, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, di mana pemerintah berperan aktif sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat dan memperkuat sektor-sektor produktif. Pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan diharapkan akan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan

## isi

Sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi ekonomi merupakan perpaduan antara ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi. Sosiologi mempelajari persoalan sosial masyarakat, sedangkan ilmu ekonomi menganalisis aktivitas produksi, konsumsi, dan distribusi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengulik sedikit tentang salah satu permasalahan sosiologi ekonomi yang sangat krusial dan selalu menjadi momok serta pekerjaan rumah yang tidak pernah terselesaikan. Yaitu permasalahan pengangguran dan juga kemiskinan dengan judul **KEPEDULIAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT.**

Pengangguran dan kemiskinan itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dan tak akan

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

pernah terpisahkan karena keduanya ini memiliki hubungan sebab akibat yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan terus meningkatnya jumlah pengangguran yang dalam masyarakat seiring itu juga tingkat kemiskinan dalam masyarakat akan meningkat juga. Dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemerintah memberikan dan memposisikan diri dalam menanggulangi masalah pengangguran serta kemiskinan ini dalam kehidupan masyarakat.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, merupakan sebuah pukulan besar bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada saat itu hingga saat ini. Krisis ekonomi ini memunculkan berbagai dampak sosial bagi seluruh kalangan baik yang miskin hingga kelas konglomerat mengalami dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kenaikan harga barang yang sangat tinggi tidak sesuai dengan daya beli masyarakat pada saat itu sehingga meningkatkan kesenjangan antar golongan masyarakat yang menjadikan tingkat kriminalitas menjadi semakin meningkat juga. Tidak sampai disitu saja, akibat dari krisis inipun berdampak pada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan. Yang mana PHK tersebut memicu reaksi pada masyarakat. Membuat suasana menjadi semakin tidak aman. Gerakan reformasi dalam pemerintahan merupakan harapan besar dari masyarakat agar keadaan bisa menjadi lebih baik. Namun kejadian demi kejadian terus berlalu belum juga bisa menghantarkan Indonesia ke posisi yang lebih baik. Hingga terjadinya penutupan perusahaan besar luar negeri, seperti Panasonic dan Toshiba pada tahun 2016 terus menghantam dan membuat suasana menjadi tidak baik saja. Penutupan inipun bukan tidak beralasan, semuanya dikarenakan terus menurunnya daya beli masyarakat pada saat itu. Dan yang lebih parah situasi itu membuat tingkat pengangguran yang menjadi semakin meningkat.

Dan dengan meningkatnya pengangguran membuat tingkat kemiskinan pun menjadi semakin meningkat tajam. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai

pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Dalam hal ini selain dampak dari krisis tersebut, ada beberapa faktor yang membuat masyarakat masih memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi, diantaranya :

1. Dalam bidang pendidikan  
Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diprioritaskan. Dipenuhinya hak tersebut akan memberi landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas pembangunan manusia Indonesia. Dengan pendidikan orang akan memiliki kemampuan dalam memikirkan dan mengusahakan diri mereka untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dikarenakan sudah menjadi kodrat dari manusia dimana mereka akan selalu ingin mendapatkan sarana dan fasilitas yang akan mempermudah untuk mencapai tujuan, sehingga kehidupan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan pendidikan akan membuat perkembangan teknologi untuk kemudahan-kemudahan bagi manusia dan hal ini tentunya ditentukan oleh perkembangan pendidikan.
2. Dalam bidang kesehatan  
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan merupakan faktor yang pendukung utama, dengan tubuh yang sehat tentunya akan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dalam permasalahan ini Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untuk bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

tumbuh dan berkembang, dan rendahnya derajat kesehatan ibu. Dan kurang memenuhi standarnya pangan dalam kehidupan mereka

3. Terbatasnya lapangan pekerjaan  
Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Kebijakan perluasan kesempatan kerja dihadapkan pada dilema antara kebutuhan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang mampu memberi insentif peningkatan investasi industri yang bersifat padat karya, dan perlunya perlindungan pekerja terhadap kepastian kerja dan upah yang layak.
4. Wilayah terisolasi  
Keterisolasian membuat penduduk yang tinggal di daerah itu sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Jika sakit, mereka harus pergi ke puskesmas di desa tetangga melintasi perbukitan. Jika ingin bersekolah mereka harus berjalan melintasi sungai masuk keluar hutan. Informasi tentang bagaimana mengolah sumber daya pertanian dan perikanan menjadi lebih bernilai pun mereka tidak dapatkan. Menjadi daerah yang terisolasi, tentu sangat sulit bagi masyarakatnya untuk berkembang. Keterisolasian membuat bahan kebutuhan pokok masyarakat menjadi mahal, distribusi sumber daya menjadi sangat sulit sehingga hasil produksi menjadi kurang bernilai. Di beberapa daerah, hasil pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi busuk akibat buruknya sarana jalan dan jembatan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mengantarkan hasil produksinya itu ke tempat lain.

Beberapa pengamat sosial-ekonomi berpendapat bahwa pada dasarnya kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia lebih disebabkan karena program pemerintah selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan langsung tunai untuk orang miskin. Hal itu antara lain, berupa beras dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena masyarakat miskin membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Akan lebih baik jika Pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan ini lebih memposisikan diri sebagai fasilitator, dengan begitu pemerintah dapat menilai masyarakat yang dalam permasalahan pengangguran dan kemiskinan ini bisa sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial.

Masyarakat miskin tidaklah semata mata harus ditingkatkan ekonominya namun lebih pada pemberian pelatihan keahlian, yang nantinya diharapkan bisa di berdayakan melalui kelompok kelompok yang nantinya akan berberap dalam lingkungannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui kelompok kelompok tersebut diharapkan bisa mewujudkan UMKM yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan penyuluhan dan pengembangan UMKM ini sangat perlu dilakukan karena usaha ini menyangkut kehidupan sebagian terbesar dari rakyat Indonesia. Usaha kecil mikro atau usaha mikro pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh orang-orang miskin atau mendekati miskin. Biasanya usaha mikro ini bergerak didalam sektor informal. Kemudian Penyediaan lapangan pekerjaan sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat, yang dikarenakan masalah pengangguran. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dilakukan dengan memindahkan pekerja ke kesempatan kerja yang kosong dan melatih ulang keterampilannya sehingga dapat memenuhi tuntutan kualifikasi di tempat baru. Peningkatan mobilitas modal dilakukan dengan memindahkan industri (padat karya) ke wilayah yang mengalami masalah pengangguran parah. Cara ini baik digunakan

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

untuk mengatasi masalah pengangguran struktural.

Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penyediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, kebijakan Pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin yang disebabkan oleh pengangguran, sehingga kepentingan masyarakat miskin akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

#### **4. Kesimpulan**

Pengangguran dan kemiskinan adalah dua isu sosial yang saling terkait dan menjadi tantangan serius bagi masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki hubungan sebab-akibat: meningkatnya pengangguran mendorong naiknya tingkat kemiskinan, menciptakan siklus yang sulit diputus. Beberapa faktor penyebab utamanya meliputi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang minim, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keterisolasian wilayah.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini sering kali terbatas pada bantuan langsung yang hanya memberikan solusi jangka pendek. Untuk memutus siklus pengangguran dan kemiskinan, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan sekadar pemberi bantuan, dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan keahlian dan pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya menjadi solusi yang efektif. Selain itu, pemerintah harus mengarahkan investasi publik dan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mandiri dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

#### **5. Saran**

Dalam menanggulangi masalah ini melalui bantuan langsung tunai dan program jaring pengaman sosial, namun pendekatan tersebut masih kurang efektif karena masyarakat lebih

membutuhkan peluang kerja untuk meningkatkan taraf hidup. Artikel ini menyarankan agar pemerintah berperan sebagai fasilitator, memberikan pelatihan keahlian, serta mendorong pembentukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pemerintah diharapkan juga memperluas lapangan pekerjaan melalui kebijakan yang mendukung industri padat karya dan investasi di wilayah yang membutuhkan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.

Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, Pemerintah bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai masalah kekurangan modal dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah Pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin. Pemerintah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penyediaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, kebijakan

Seminar Nasional  
(PROSPEK IV)

**“Memberdayakan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial : Peran Pendidikan Dalam Membangun Masa Depan Yang Berkelanjutan”** 11 Desember 2024

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIS, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin yang disebabkan oleh pengangguran, sehingga kepentingan masyarakat miskin akan menjadi prioritas dalam pembangunan

**Daftar Pustaka**

Khairuddin, H. 2000. Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta : Erlangga.

Pikiran Rakyat, 9 November 2015, Pengangguran Terbuka DIY Naik Signifikan, (online), (<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/09/349224/pengangguranterbuka-diy-naik-signifikan>, diakses 29 Juni 2016)